

Mekanisme *Good Corporate Governance* dan *Tax Avoidance* pada Perusahaan Pertambangan Indonesia

Good Corporate Governance Mechanisms and Tax Avoidance in Indonesian Mining Companies

**Abidah Dwi Rahmi Satiti¹,
Siti Nur Qomariya²,
Fitri Nurjanah³,
Dwi Hari Prayitno⁴,**

^{1,2,3,4}Program Studi
Akuntansi, Fakultas Ekonomi
dan Bisnis, Universitas Islam
Lamongan

Surel Korespondensi:
abidahdwiarahmi@unisla.ac.id

Abstrak

Tax avoidance menjadi isu penting dalam tata kelola perusahaan karena berhubungan dengan strategi yang sah yang ditempuh perusahaan untuk mengurangi beban pajaknya, tetapi pada saat bersamaan dapat mengurangi potensi penerimaan negara. Sektor pertambangan memerlukan perhatian khusus dalam studi ini. Industri tersebut memiliki pola transaksi rumit serta struktur organisasi yang kompleks. Selain itu, pemerintah menetapkan pengawasan fiskal yang sangat ketat pada sektor ini. Studi ini menganalisis dampak tata kelola perusahaan yang baik terhadap aktivitas penghindaran pajak. Fokus utama mencakup peran dewan komisaris independen, representasi perempuan dalam dewan direksi, serta kinerja komite audit. Peneliti mengamati emiten pertambangan di Bursa Efek Indonesia antara tahun 2021 hingga 2024. Riset ini memakai metode kuantitatif. Peneliti mengumpulkan data panel bersumber dari laporan tahunan resmi tiap perusahaan. Indikator penghindaran pajak merujuk pada Effective Tax Rate (ETR). Rasio ini membandingkan total beban pajak dengan laba sebelum pajak perusahaan. Peneliti lalu mengonversi nilai tersebut menjadi indeks *tax avoidance* dengan rumus $TA = 1 - ETR$. Sebanyak 52 entitas pertambangan menjadi subjek dalam penelitian ini selama rentang 2021–2024. Proses ini menghasilkan total 208 observasi tahun-perusahaan yang valid. Pengolahan data dilakukan melalui teknik regresi data panel. Temuan menunjukkan bahwa dewan komisaris independen dan keragaman gender tidak memberikan pengaruh nyata pada praktik penghindaran pajak. Sebaliknya, komite audit memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan tersebut. Hasil ini membuktikan bahwa kontrol teknis komite audit lebih efektif dalam mengendalikan strategi pajak. Pengawasan ini jauh lebih dominan ketimbang elemen tata kelola yang bersifat administratif atau struktural semata.

Kata kunci: *good corporate governance*, dewan komisaris independen, gender dewan direksi, komite audit, *tax avoidance*.

Abstract

Tax avoidance is an important issue in corporate governance because it relates to legitimate strategies that companies take to reduce their tax burden, but at the same time can reduce potential state revenues. The mining sector deserves special attention in this study. The industry has complex transaction patterns as well as complex organizational structures. In addition, the government established very strict fiscal supervision on this sector. This study analyzes the impact of good corporate governance on tax avoidance activities. The main focus includes the role of the independent board of Commissioners, the representation of women in the board of directors, as well as the performance of the audit committee. Researchers observed mining issuers on the Indonesia Stock Exchange between 2021 and 2024. This research uses quantitative methods. Researchers collected panel data sourced from each company's official annual report. The tax avoidance indicator refers to the Effective Tax Rate (ETR). This ratio compares the total tax expense with the company's profit before tax. The researchers then converted the value into a tax avoidance index with the formula $TA=1-ETR$. A total of 52 mining entities were the subjects of this study during the 2021-2024 range. This process resulted in a total of 208 valid company-Year observations. Data processing is done through panel data regression techniques. The findings showed that independent BOCS and gender diversity had no real effect on tax avoidance practices. On the contrary, the audit committee has a significant influence on the policy. These results prove that the audit committee's technical control is more effective in controlling tax strategy. This supervision is much more dominant than the elements of governance that are administrative or structural.

Keywords: *good corporate governance, independent commissioners, board gender diversity, audit committee, tax avoidance.*

PENDAHULUAN

Sebagai sumber pendapatan utama bagi negara, pajak sangat penting dalam memastikan pendanaan yang cukup untuk pembangunan nasional. Banyak pihak di sektor ini melihat pajak sebagai beban bagi pendapatan setelah pajak, yang pada gilirannya memotivasi manajemen untuk mencari cara mengendalikan pengeluaran. Penghindaran pajak adalah salah satu pendekatannya; ini adalah praktik untuk mencoba meminimalkan kewajiban pajak secara sah dengan memanfaatkan celah dalam undang-undang pajak. Meskipun teknik ini tidak ilegal, namun tetap menjadi sumber kontroversi karena menunjukkan kurangnya akuntabilitas dan transparansi dalam kepemimpinan industri dan dapat menurunkan pendapatan negara (Satiti *et al.*, 2026; Devi and Rohman, 2024).

Industri pertambangan menjadi fokus penelitian ini karena memiliki karakteristik transaksi yang kompleks, struktur perusahaan yang berlapis, serta berada di bawah pengawasan fiskal dan regulasi yang relatif ketat dibandingkan banyak sektor lainnya. Hal ini semakin rumit

karena struktur industrinya yang kompleks, interaksi antar entitas, dan kebutuhan modal yang besar. Selain itu, bisnis pertambangan memiliki peluang tambahan untuk persiapan pajak karena pembatasan fiskal yang ketat (Satiti *et al.*, 2021). Karena adanya ketegangan yang melekat antara efisiensi dan kepatuhan di sektor pertambangan, penghindaran pajak di Indonesia merupakan topik penting untuk dipelajari (Devi and Rohman, 2024). Pemeriksaan fungsi struktur tata kelola industri sangat penting, karena taktik penghindaran pajak di sektor ini masih menjadi masalah, menurut studi tentang Penghindaran Pajak di Industri Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (Martini & Rismawandi, 2025).

ini menerapkan *Agency Theory* dan *Feminist Theory* sebagai basis teoretis guna memaparkan kaitan antara tata kelola perusahaan yang baik dengan penghindaran pajak. *Agency Theory* memfokuskan ulasan pada fungsi instrumen pengawasan dalam meminimalisasi benturan kepentingan. Di sisi lain, *Feminist Theory* menguraikan kontribusi diversitas gender dalam dinamika penentuan kebijakan perusahaan.

Kerangka tata kelola dalam riset ini mengacu pada tiga pilar utama: komisaris independen, gender dalam jajaran direksi, serta komite audit. Komisaris independen bersama komite audit mewujudkan fungsi kontrol yang kuat. Sementara itu, keberadaan gender pada dewan direksi mencerminkan variasi dalam perumusan langkah strategis entitas.. Rizqia and Lastiati (2021) serta Sulistyawati and Rahmawati (2024) menyatakan bahwa kontrol yang optimal mampu menekan tindakan oportunistis pihak manajemen, khususnya terkait praktik pajak. Akan tetapi, temuan terbaru dari Utaminingsih *et al.* (2022), Ibrahim *et al.* (2025), Alawiyah and Wulandari (2024) menunjukkan bahwa dampak setiap elemen tata kelola terhadap *tax avoidance* masih menunjukkan hasil yang bervariasi.

Dari perspektif keberagaman gender, kehadiran perempuan dalam dewan direksi sering dikaitkan dengan kecenderungan pengambilan keputusan yang lebih hati-hati, lebih sensitif terhadap risiko, dan lebih memperhatikan aspek etika. Dalam penelitian Mala and Ardiyanto (2021), *gender diversity* dipandang dapat mempengaruhi sikap perusahaan terhadap kebijakan pajak karena perbedaan sudut pandang dalam proses pengambilan keputusan. Temuan lain dari Manuela and Sandra (2022) dan Sulistyawati and Rahmawati (2024) juga menunjukkan bahwa peran gender dewan direksi layak diperhitungkan dalam menjelaskan variasi perilaku pajak perusahaan.

Temuan empiris yang tersedia saat ini tetap memaparkan kesimpulan yang beragam. Sejumlah studi, termasuk karya Julvita and Pusposari (2025), menunjukkan bahwa keberagaman gender pada jajaran direksi tidak selamanya memberikan dampak besar bagi *tax avoidance*. Kondisi ini mengindikasikan bahwa peranan komposisi gender sangat bergantung pada jenis industri, sistem tata kelola, serta lingkungan sosial dan ekonomi yang melingkupi perusahaan tersebut. Dengan demikian, penting untuk mengkaji lebih dalam bagaimana *gender diversity* berperan dalam penghindaran pajak, terutama pada sektor dengan regulasi yang ketat, seperti perusahaan pertambangan di Indonesia.

Komite audit merupakan elemen fundamental dalam ekosistem tata kelola *good corporate governance* untuk mengoptimalkan fungsi pengawasan pajak. Pihak ini memiliki otoritas dalam menjamin seluruh regulasi perpajakan internal tetap patuh pada hukum serta berlandaskan pada asas transparansi dan akuntabilitas. Komite audit yang efektif dapat mengurangi praktik *tax avoidance* dengan memperkuat sistem pengendalian internal. serta meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi fiskal. Penelitian oleh Aganthasyah *et al.* (2025) menunjukkan bahwa adanya komite audit yang anggotanya memiliki keahlian dalam akuntansi dan keuangan dapat mengurangi potensi manipulasi pajak di perusahaan. Hal ini diperkuat oleh temuan Dewi (2025) yang juga menekankan bahwa komite audit yang berkompeten dapat memperbaiki pengawasan atas kebijakan pajak dan memastikan bahwa laporan keuangan mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Namun, temuan lain seperti yang dilaporkan oleh Ariella and Rasmini (2024) serta Faricha and Ermawati (2025) menunjukkan hasil yang tidak

konsisten, di mana komite audit tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap praktik *tax avoidance* pada perusahaan di sektor pertambangan dan *real estate*.

Kesenjangan penelitian dalam studi ini muncul setidaknya dari dua hal. Pertama, hasil penelitian sebelumnya mengenai pengaruh dewan komisaris independen, keberagaman gender dalam dewan direksi, dan komite audit terhadap *tax avoidance* masih menunjukkan hasil yang bervariasi. Pramudya and Rahayu (2021) serta Ardiansyah and Zulaihati (2022) menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan dapat berhubungan dengan perilaku penghindaran pajak, tetapi Alawiyah and Wulandari (2024) dan Utaminingsih *et al.* (2022) memperlihatkan bahwa arah dan kekuatan hubungan tersebut tidak selalu konsisten. Selain menunjukkan hasil yang belum konsisten, sebagian besar penelitian terdahulu cenderung menguji masing-masing mekanisme good corporate governance secara terpisah. Penelitian yang menganalisis secara simultan pengaruh dewan komisaris independen, gender dewan direksi, dan komite audit terhadap *tax avoidance*, khususnya pada perusahaan pertambangan di Indonesia, masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai peran ketiga mekanisme tersebut dalam memengaruhi *tax avoidance*.

Kesenjangan kedua, penelitian yang secara khusus berfokus pada perusahaan pertambangan Indonesia untuk periode 2021–2024 masih relatif terbatas. Periode tersebut dipilih karena merepresentasikan fase pemulihan ekonomi pascapandemi COVID-19 yang diikuti dengan penguatan kepatuhan perpajakan dan tata kelola perusahaan, sehingga menjadi periode yang relevan untuk mengevaluasi hubungan antara mekanisme *good corporate governance* dan *tax avoidance*.

Berdasarkan kondisi tersebut, kebaruan penelitian ini terletak pada fokusnya pada perusahaan pertambangan di Indonesia periode 2021–2024, penggunaan tiga mekanisme *good corporate governance* secara simultan, serta upaya memperjelas kembali hubungan antara mekanisme pengawasan dan keberagaman pengambilan keputusan dengan *tax avoidance*. Penulis melakukan studi ini untuk memperluas bukti empiris mengenai fungsi mekanisme tata kelola serta memberikan rekomendasi bagi penguatan manajemen pajak korporasi pada sektor pertambangan yang penuh kompleksitas transaksi dan tekanan regulasi. Optimalisasi tata kelola perusahaan melalui peran dewan komisaris independen, komite audit, dan diversitas direksi mampu membatasi potensi tindakan koruptif berbahaya serta mendorong perusahaan memenuhi kewajiban perpajakan secara bertanggung jawab. Studi ini menganalisis secara mendalam pengaruh dewan komisaris independen, komposisi gender direksi, dan komite audit terhadap praktik *tax avoidance* pada emiten pertambangan di Bursa Efek Indonesia selama rentang tahun 2021 sampai 2024. Hasil penelitian membuktikan efektivitas sistem tata kelola dalam meredam penghindaran pajak sekaligus menjadi rujukan krusial bagi korporasi dan regulator untuk memperkuat arsitektur perpajakan nasional.

TINJAUAN PUSTAKA

Agency Theory

Interaksi antara pemegang saham dalam kapasitas prinsipal serta manajemen sebagai agen dipaparkan *Agency Theory* sebagai pemantik munculnya friksi kepentingan. Penelitian ini mengaplikasikan kerangka tadi guna membedah fungsionalitas instrumen tata kelola perusahaan, mencakup dewan komisaris independen dan komite audit, dalam mereduksi konflik via supervisi mendalam terhadap kebijakan perpajakan entitas.

Jensen & Meckling (1976) adalah yang pertama kali memperkenalkan *Agency Theory*, yang berpusat pada dinamika antara pemilik utama perusahaan dan agennya, yaitu manajemennya, serta isu-isu yang berkembang sebagai akibat dari potensi konflik kepentingan antara kedua pihak. Riset ini mengaktualisasikan *Agency Theory* pada ranah kebijakan

perpajakan korporat guna menyajikan perspektif perihal efektivitas tata kelola perusahaan dalam mendegradasi beban keagenan. Reduksi *tax avoidance* secara masif dipicu oleh inisiatif komite audit serta dewan komisaris independen guna mengelevasi supervisi, menjamin konformitas regulasi pada eksekusi strategi fiskal, sekaligus menyekat kapasitas manajerial untuk mendistorsi aspek perpajakan.

Dalam kerangka *Agency Theory*, ewan komisaris independen beserta komite audit berfungsi sebagai instrumen pemantauan (*monitoring mechanisms*) yang berorientasi pada mitigasi konflik atensi antara eksekutif dengan pemegang saham (Jensen & Meckling, 1976). Kendati begitu, kedua perangkat tadi mengemban spesialisasi berbeda. Dewan komisaris independen mengoperasikan supervisi level strategis melalui asesmen terhadap pedoman, ketetapan, beserta aksi manajemen guna menggaransi bahwa pengelolaan organisasi tetap koheren dengan ekspektasi investor. Sebaliknya, komite audit menitikberatkan atensi pada kontrol teknis reliabilitas pelaporan keuangan, efisiensi sistem internal kontrol, prosedur audit, serta ketaatan korporasi terhadap supremasi hukum. Walhasil, dualitas mekanisme tersebut saling menyempurnakan dalam memperkuat tata kelola perusahaan sehingga diproyeksikan mampu mereduksi probabilitas fenomena *tax avoidance* (Jensen & Meckling, 1976).

Feminist Theory

Feminist Theory digunakan dalam penelitian ini untuk menjelaskan bagaimana keberagaman gender dalam dewan direksi dapat memengaruhi proses pengambilan keputusan perusahaan, termasuk keputusan yang berkaitan dengan kebijakan perpajakan. Teori ini menjadi landasan dalam menganalisis peran perempuan dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kualitas tata kelola perusahaan.

Feminist Theory menaruh atensi bagi heterogenitas seksual pada manajemen korporasi serta dampaknya bagi determinasi manajerial lewat premis jika eksistensi wanita di otoritas strategis, semisal dewan direksi, mampu menyodorkan cakrawala pemikiran distingtif guna memformulasikan resolusi terbuka serta ekuivalen, mencakup ketetapan terkait kebijakan pajak. Melalui lingkup ini, keberagaman gender di jajaran direksi mampu menginisiasi visi bermoral bagi mitigasi praktik *tax avoidance* via penguatan akuntabilitas serta keterbukaan keputusan organisasi. Keberagaman gender pada strata direksi diestimasikan mampu mentransformasi regulasi firma, mencakup kebijakan perpajakan, ke arah kian transparan dan beretika. Mala and Ardiyanto, 2021; Sulistyawati and Rahmawati, 2024).

Kombinasi *Agency Theory* dan *Feminist Theory* memberikan kerangka analitis untuk memahami bagaimana mekanisme *good corporate governance* dapat memengaruhi *tax avoidance*. Sudut pandang *Agency Theory* memfokuskan urgensi fungsi pengawasan dalam meminimalisir divergensi kepentingan antar agen serta prinsipal, namun *Feminist Theory* mendeskripsikan keberadaan gender dewan direksi yang majemuk sanggup menginisiasi konklusi kebijakan secara kredibel, moralis, pun terbuka. Kendati *Agency Theory* beserta *Feminist Theory* memiliki titik tekan divergen, keduanya berkoherensi satu sama lain saat menguraikan determinan *good corporate governance*. Logika *Agency Theory* bertumpu terhadap reliabilitas monitoring formal demi memangkas friksi antara manajerial dan investor, sedangkan *Feminist Theory* menonjolkan esensi heterogenitas pandangan pada dinamika penetapan keputusan. Konsekuensinya, investigasi ini menganalisis dewan komisaris independen, aspek gender dewan direksi, maupun komite audit secara kolaboratif guna memperoleh pemahaman holistik mengenai dampak perpaduan pengawasan serta profil dewan terhadap perilaku *tax avoidance*.

Dewan Komisaris Independen dan *Tax Avoidance*

Merujuk pada *Agency Theory*, eksistensi dewan komisaris independen berfungsi selaku instrumen supervisi guna meminimalisasi friksi atensi antar pengelola dan pemilik modal (Jensen & Meckling, 1976), mencakup determinasi regulasi fiskal. Figur dewan komisaris independen

berandil mereduksi beban agensi (*agency costs*) lewat penjaminan keputusan manajerial senantiasa koheren terhadap aspirasi investor, termasuk dalam aspek kebijakan perpajakan. Rizqia and Lastiati (2021) memproyeksikan bahwasanya monitoring nir-afiliasi yang terintegrasi mutu pemeriksaan mumpuni sanggup mengeskalasi pengendalian terhadap skema pajak korporasi secara menyeluruh. Pramudya and Rahayu (2021) serta Martin and Kunci (2024) menunjukkan bahwa kehadiran dewan komisaris independen diprediksi sanggup menginhibisi orientasi eksekutif untuk mengimplementasikan taktik pajak yang bersifat radikal. Konsekuensinya, manakala signifikansi fungsi dewan komisaris independen kian intensif, maka probabilitas entitas guna terjerumus ke dalam aktivitas *tax avoidance* akan mengalami degradasi secara signifikan.

H1: Dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Gender Dewan Direksi dan *Tax Avoidance*

Berdasarkan *Feminist Theory*, keberagaman gender dalam dewan direksi diharapkan dapat menghadirkan perspektif yang lebih beragam dalam proses pengambilan keputusan, termasuk kebijakan perpajakan perusahaan. Keberagaman gender di dewan direksi diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam keputusan strategis perusahaan, termasuk dalam hal pengelolaan pajak (Mala & Ardiyanto, 2021). Manuela and Sandra (2022) berpendapat bahwa perusahaan yang memiliki dewan direksi dengan keberagaman lebih tinggi cenderung lebih patuh terhadap regulasi pajak dan menghindari *tax avoidance*. Zudana *et al.* (2021) juga menemukan bahwa keberagaman ini mendorong transparansi dalam pengelolaan pajak.

H2: Gender dewan direksi berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Komite Audit dan *Tax Avoidance*

Berdasarkan *Agency Theory*, komite audit bertindak selaku instrumen kontrol guna memitigasi diskrepansi kepentingan antara pihak pengelola dan pemilik modal lewat eskalasi supervisi terhadap kebijakan perpajakan (Jensen & Meckling, 1976). Komite audit yang kredibel, dengan personil yang mempunyai kompetensi mendalam dalam domain finansial serta akuntansi, berpotensi lebih optimal guna menstimulasi entitas agar patuh pada norma hukum serta mereduksi tendensi praktik *tax avoidance*. Penelitian oleh Aganthasyah *et al.* (2025) mengungkapkan bahwa komite audit yang menguasai akuntansi secara komprehensif mampu mendepresiasi tingkat *tax avoidance* pada korporasi, sedangkan Dewi (2025) menegaskan bahwa komite audit dengan kuantitas anggota luas serta independen berkorelasi pada penurunan *tax avoidance*, melalui penguatan pengawasan internal dan penjaminan ketaatan atas regulasi fiskal.

H3: Komite Audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

METODE

Populasi Penelitian mencakup sejumlah 122 entitas ekstraksi mineral yang tercatat pada entitas bursa domestik (BEI) dalam kurun waktu 2021–2024. Berikutnya, teknik purposive sampling diterapkan guna menyeleksi unit amatan lewat parameter spesifik, yakni korporasi yang merilis berkas laporan keuangan secara komprehensif, nihil defisit finansial, serta menunaikan kewajiban penyetoran fiskal secara berkesinambungan sepanjang masa observasi. Melalui limitasi itu didapatkan 52 korporat selaku subjek kajian empiris atau sebanyak 208 amatan perusahaan-tahun.

Variabel *tax avoidance* (TA) diukur menggunakan *Effective Tax Rate* (ETR), yang dihitung dengan rumus $TA = 1 - \text{ETR}$ (Devi and Rohman, 2024; Martini and Rismawandi, 2025).

Variabel independen yang diuji meliputi: (1) Dewan Komisaris Independen (DKI) yang dihitung berdasarkan persentase komisaris independen (Devi and Rohman, 2024; Ibrahim *et al.*, 2025); (2) Gender Dewan Direksi (GDD) yang diukur dengan *dummy variable*, 1 untuk adanya perempuan dalam dewan direksi (Utaminingsih *et al.*, 2022; Sulistyawati and Rahmawati, 2024); dan (3) Komite Audit (KA) diukur berdasarkan proporsi anggota komite audit yang memiliki keahlian di bidang akuntansi dan keuangan (Rizqia and Lastiati, 2021; Aganthasyah *et al.*, 2025).

Model regresi data panel dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

$$TA_{it} = \alpha + \beta_1DKI_{it} + \beta_2GDD_{it} + \beta_3KA_{it} + \varepsilon_{it}$$

Keterangan: TA_{it} adalah *tax avoidance* perusahaan i pada tahun t ; α adalah konstanta; β_1 , β_2 , dan β_3 adalah koefisien regresi masing-masing variabel independen; DKI_{it} adalah Dewan Komisaris Independen perusahaan i pada tahun t ; GDD_{it} adalah Gender Dewan Direksi perusahaan i pada tahun t ; KA_{it} adalah Komite Audit perusahaan i pada tahun t ; ε_{it} adalah error term; i menunjukkan perusahaan; dan t menunjukkan tahun pengamatan.

Data dianalisis menggunakan regresi dengan bantuan perangkat lunak Stata. Pengujian hipotesis dilakukan menggunakan uji t pada tingkat signifikansi 1% dan 5%.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Deskriptif

Tabel ini menunjukkan ringkasan statistik deskriptif mengenai seluruh variabel dalam riset. Kumpulan data tersebut memuat informasi nilai rata-rata, simpangan baku, serta angka terendah dan tertinggi pada tiap variabel yang menjadi objek kajian.

Tabel 1. Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

Variabel	Obs	Mean	Std. Dev.	Min.	Max.
TA (1 - ETR)	208	0,3320936	0,4858502	0,0000265	3,727698
DKI (%)	208	0,8202534	0,4386259	1	4
GDD (dummy)	208	0,0865385	0,2818358	0	1
KA (proporsi ahli)	208	1,488301	0,1553981	1	2

Sumber: Data Penelitian, 2026

Berdasarkan tabel di atas, *tax avoidance* (TA) memiliki rata-rata 0,3320, yang mengindikasikan bahwa rata-rata *effective tax rate* (ETR) perusahaan adalah sekitar 33,2%. Deviasi standar yang cukup besar (0,4859) menunjukkan adanya variasi yang signifikan antara perusahaan dalam tingkat *tax avoidance*. Nilai maksimum *tax avoidance* yang relatif tinggi menunjukkan adanya beberapa observasi dengan karakteristik beban pajak yang berbeda dibandingkan mayoritas sampel. Penyesuaian beban pajak sesuai regulasi akuntansi dan aturan perpajakan memicu terjadinya kondisi tersebut. Hal ini meliputi pengakuan manfaat pajak tangguhan serta penerapan koreksi fiskal pada periode tertentu. Di sisi lain, capaian nilai minimum yang mendekati nol mencerminkan eksistensi perusahaan dengan tingkat penghindaran pajak yang sangat rendah. Peneliti mengambil data aktual secara langsung dari laporan keuangan perusahaan. Tidak ada indikasi kesalahan dalam proses pencatatan data. Maka dari itu, studi ini tetap mempertahankan seluruh observasi di dalam tahapan analisis.

Variabel Dewan Komisaris Independen (DKI) menghasilkan nilai rata-rata sebesar 0,8202. Angka tersebut membuktikan bahwa mayoritas perusahaan sampel menempatkan persentase komisaris independen yang signifikan. Data Gender Dewan Direksi (GDD) menunjukkan bahwa hanya 8,65% perusahaan yang memiliki minimal satu keterwakilan perempuan pada jajaran direksi. Terakhir, variabel Komite Audit (KA) mencatatkan rerata 1,4883. Hasil ini menegaskan bahwa sebagian besar perusahaan memiliki tim komite audit dengan latar belakang keahlian akuntansi dan keuangan yang mumpuni.

Uji Asumsi Klasik

Peneliti menjalankan uji asumsi klasik terlebih dahulu guna menjamin data telah memenuhi persyaratan fundamental model regresi. Data hasil uji multikolinearitas mengungkapkan bahwa seluruh variabel independen memiliki nilai Variance Inflation Factor (VIF) kurang dari 10, yang mengonfirmasi ketiadaan masalah multikolinearitas signifikan pada model penelitian. Selanjutnya, uji heteroskedastisitas menggunakan uji Breusch-Pagan mengidentifikasi adanya masalah ketidakteraturan dalam variansi data, dengan nilai *chi-square* sebesar 148,72 dan probabilitas 0,0000, yang menunjukkan adanya heteroskedastisitas.

Untuk mengatasi masalah ini, kami menerapkan penyesuaian *robust* pada *standard errors*, yang telah terbukti efektif untuk memberikan estimasi koefisien yang lebih konsisten dan menghasilkan uji signifikansi yang lebih akurat meskipun terdapat heteroskedastisitas. Teknik ini merupakan pendekatan yang diakui dalam literatur kuantitatif, seperti yang disarankan oleh White (1980), dan sering digunakan dalam analisis regresi data panel.

Uji Kelayakan Model

Peneliti menerapkan uji kelayakan model guna memvalidasi kapasitas variabel independen dalam mendeskripsikan fluktuasi *tax avoidance*. Hasil olah data menyajikan perolehan koefisien determinasi (R-squared) pada angka 0,0575 serta Adjusted R-squared sebesar 0,0437. Angka tersebut mengonfirmasi bahwa dewan komisaris independen, gender dewan direksi, dan komite audit secara kolektif memengaruhi 5,75% variasi penghindaran pajak, sementara faktor lain di luar penelitian ini menguasai sisa porsi sebesar 94,25%. Terlebih lagi, capaian nilai probabilitas uji F sebesar 0,007 ($<0,05$) membuktikan kelayakan model regresi secara simultan dalam mengevaluasi hubungan antara variabel independen dan *tax avoidance*.

Uji Hipotesis

Tabel berikut menyajikan temuan pengujian hipotesis untuk mengidentifikasi dampak DKI, GDD, serta KA terhadap *tax avoidance*. Analisis ini bertujuan mengevaluasi signifikansi pengaruh ketiga faktor tersebut terhadap praktik penghindaran pajak dalam lingkup korporasi.

Tabel 2. Hasil Uji Signifikansi Parsial (Uji t)

Variabel	Koefisien	Std. Error	t-Statistik	Prob	Kesimpulan
DKI	-0,2767	0,7594	-0,36	0,716	Ditolak
GDD	-1,8854	1,1861	-1,59	0,113	Ditolak
KA	-6,9693	2,1332	-3,27	0,001	Diterima

Keterangan: Signifikan pada 1% dan 5%.

Sumber: Data diolah penulis, 2026

Data pengujian mengungkapkan bahwa DKI (Dewan Komisaris Independen) tidak memiliki pengaruh signifikan pada *tax avoidance*. Nilai probabilitas sebesar 0,716 melebihi standar 0,05, sehingga kehadiran komisaris independen dalam sampel ini tidak mampu mengintervensi kebijakan perpajakan entitas secara langsung. Begitu pula dengan GDD (Gender Dewan Direksi) yang tidak mencatatkan pengaruh signifikan karena memiliki tingkat probabilitas 0,113. Temuan ini mengindikasikan bahwa komposisi gender dalam jajaran direksi tidak berkontribusi nyata dalam mereduksi tindakan *tax avoidance* perusahaan. Di sisi lain, KA (Komite Audit) menunjukkan pengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* dengan koefisien -6,9693 dan probabilitas 0,001. Angka yang berada di bawah ambang batas 0,05 tersebut menegaskan bahwa komite audit yang kompeten sanggup menurunkan intensitas penghindaran pajak secara efektif.

Pengaruh Dewan Komisaris Independen Terhadap *Tax Avoidance*

Data penelitian mengungkapkan bahwa Dewan Komisaris Independen (DKI) tidak memengaruhi praktik penghindaran pajak di perusahaan pertambangan secara nyata. Teori Agensi memosisikan DKI sebagai instrumen untuk menekan biaya agensi melalui pengawasan ketat terhadap kebijakan manajemen dan perpajakan. Namun, temuan ini menunjukkan bahwa peran pengawasan DKI belum cukup kuat untuk mengendalikan keputusan pajak pada sektor tambang. Fakta tersebut menandakan bahwa fungsi kontrol dewan komisaris independen belum beroperasi secara efektif dalam memengaruhi arah kebijakan pajak perusahaan.

Temuan ini lebih sejalan dengan Rizqia and Lastiati (2021) dan Devi and Rohman (2024) yang menekankan perlunya efektivitas tata kelola untuk meredam penghindaran pajak. Perbedaan data tersebut membuktikan bahwa kualitas independensi, kompetensi, pengalaman, dan keaktifan komisioner lebih menentukan efektivitas daripada sekadar jumlah mereka. Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan tata kelola menuntut kapasitas pengawasan kebijakan pajak yang substansial, bukan hanya penambahan proporsi komisaris independen.

Pengaruh Gender Dewan Direksi Terhadap *Tax Avoidance*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa gender dewan direksi (GDD) tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberagaman gender pada jajaran direksi belum mampu memitigasi *tax avoidance* di perusahaan sektor pertambangan secara efektif. Teori Feminis menegaskan bahwa diversitas gender dalam dewan direksi menghadirkan perspektif etis serta inklusif yang seharusnya mengoptimalkan transparansi dan akuntabilitas kebijakan pajak korporasi. Meski demikian, hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa dampak keberagaman gender terhadap kebijakan perpajakan tetap terbatas walaupun eksistensinya tergolong penting.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Salsabila and Dalimunthe (2025) yang menyatakan bahwa ketiadaan pengaruh signifikan antara gender dewan direksi dengan *tax avoidance*. Representasi gender dalam struktur dewan memang tidak selalu memberikan efek besar terhadap kebijakan perusahaan. Temuan tersebut mengisyaratkan bahwa kehadiran perempuan di kursi direksi tidak secara otomatis mendikte arah kebijakan pajak entitas bisnis. Maka dari itu, heterogenitas gender dalam jajaran direksi sebatas mencerminkan komposisi keanggotaan dewan tanpa menentukan haluan strategi perpajakan secara langsung.

Pengaruh Komite Audit Terhadap *Tax Avoidance*

Komite audit memberikan dampak besar dalam menekan praktik penghindaran pajak. Hasil ini memperkuat Teori Agensi dari Jensen and Meckling (1976), yang menyatakan yang menjelaskan bahwa komite audit berkompeten mampu meminimalkan biaya keagenan melalui pengawasan ketat atas strategi pajak. Lembaga ini memegang kendali utama untuk menjamin kepatuhan pajak perusahaan terhadap hukum dan mencegah manipulasi oleh pihak manajemen. Personel komite audit yang menguasai bidang akuntansi serta keuangan menunjukkan efektivitas lebih tinggi dalam mengawasi prosedur perpajakan sekaligus menghambat *tax avoidance*.

Penemuan ini sejalan dengan penelitian Ibrahim *et al.* (2025) dan Aganthasyah *et al.* (2025) yang menegaskan bahwa kapasitas komite audit menurunkan tingkat *tax avoidance* lewat pengawasan intensif pada kebijakan perpajakan entitas. Teori Agensi memandang komite audit yang solid sebagai instrumen untuk memitigasi benturan kepentingan antara manajer dan investor yang sering memicu tindakan *tax avoidance*.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Analisis komprehensif studi ini mengeksplorasi determinasi instrumen *good corporate governance* atas *tax avoidance* bagi korporasi pertambangan di Bursa Efek Indonesia. Estimasi saintifik memaparkan bahwa komite audit memiliki andil krusial guna memitigasi *tax avoidance*, namun dewan komisaris independen serta keberagaman gender lingkup dewan direksi urung memperlihatkan implikasi bermakna. Hasil tersebut mengonfirmasi relevansi Teori Agensi, yang menitikberatkan urgensi supervisi fungsional demi meminimalisir *agency costs* terkait regulasi perpajakan entitas akademik. Di sisi berbeda, perspektif Feminisme memproyeksikan eksistensi keberagaman gender seharusnya berpotensi mengeskalasi transparansi serta akuntabilitas dalam sebuah kebijakan perusahaan, walaupun pengaruhnya bagi *tax avoidance* tidak menunjukkan hasil yang signifikan dalam pelaksanaan observasi penelitian ini.

Secara makro, data riset membuktikan bahwa performa konstruk *good corporate governance* untuk mereduksi fenomena praktik *tax avoidance* tidak sekadar dipengaruhi eksistensi struktur monitoring, melainkan kualitas operasional fungsi supervisinya. Inkonsistensi data menyimpulkan bahwa komite audit menjadi instrumen manajerial paling mumpuni dalam mengontrol kepatuhan fiskal korporat, sebaliknya dewan komisaris independen maupun gender dewan direksi lingkup dewan direksi belum berhasil menyumbangkan dampak statistik signifikan terhadap perilaku praktik *tax avoidance* pada periode amatan.

Implikasi teoritis dari studi ini adalah bahwa komite audit yang kompeten berkontribusi penting dalam menekan praktik *tax avoidance*, memperkuat pengawasan, serta memastikan kepatuhan terhadap regulasi fiskal. Selain itu, penelitian ini memperkaya diskusi terkait dengan *Agency Theory* dan *Feminist Theory*, dengan menunjukkan bahwa meskipun *gender diversity* di dewan direksi berpotensi meningkatkan kualitas pengambilan keputusan, faktor lain seperti keahlian komite audit lebih dominan dalam mengurangi *tax avoidance*. Secara praktis, temuan ini menyarankan perusahaan sektor pertambangan untuk memperkuat peran komite audit yang anggotanya memiliki keahlian dalam bidang perpajakan dan akuntansi, untuk memperbaiki pengawasan terhadap kebijakan perpajakan."

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, di antaranya adalah penggunaan data sekunder yang hanya mencakup perusahaan-perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, dengan dapat membatasi generalisasi temuan ke sektor lain. Selain itu, penelitian ini tidak mempertimbangkan beberapa variabel lain yang dapat memberikan pengaruh *tax avoidance*, di antaranya profitabilitas atau *leverage*. Penelitian ini juga mengukur variabel gender dewan direksi menggunakan variabel *dummy* berdasarkan keberadaan minimal satu perempuan dalam dewan direksi. Pendekatan tersebut menghasilkan variasi data yang relatif rendah sehingga berpotensi membatasi kemampuan model dalam menangkap pengaruh keberagaman gender terhadap *tax avoidance*.

Saran

Sebagai tindak lanjut, disarankan agar penelitian berikutnya memperluas sampel untuk mencakup sektor-sektor lainnya, seperti perusahaan manufaktur atau perbankan, serta memasukkan variabel lain yang relevan untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif. Penelitian selanjutnya juga disarankan menggunakan ukuran gender dewan direksi yang lebih representatif, seperti proporsi perempuan dalam dewan direksi atau indeks keberagaman, sehingga pengaruh keberagaman gender terhadap *tax avoidance* dapat dievaluasi secara lebih komprehensif. Selain itu, penelitian dapat menggunakan data primer untuk memperoleh pandangan langsung dari manajer atau anggota dewan direksi mengenai kebijakan perpajakan

yang diterapkan di perusahaan, guna memperkaya analisis pengawasan internal terhadap *tax avoidance*.

DAFTAR PUSTAKA

- Aganthasyah, M., Kusharyanti, K., & Prasetyo, J. E. (2025). The effectiveness of the audit committee in reducing tax avoidance in mining companies in Indonesia with external audit quality as a moderating variable. *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IIJSE)*, 8(3), 11503–11513.
- Alawiyah, R. L., & Wulandari, S. (2024). The influence of gender diversity, independent commissioners, audit committees, institutional ownership, and profit management on tax avoidance. *SIMAK*, 22(01), 139–163.
- Ardiansyah, M. N., & Zulaihati, S. (2022). The effect of independent commissioners, company size and profitability on tax avoidance in companies listed in the IDX80 Index Of The Indonesia Stock Exchange. *Jurnal Pendidikan Ekonomi, Perkantoran, Dan Akuntansi*, 3(3), 228–238.
- Ariella, N. K. N. A., & Rasmini, N. K. (2024). The effect of company age, capital intensity and audit committee on tax avoidance. *Jurnal Ekonomi*, 13(03), 1894–1906.
- Devi, A. N., & Rohman, A. (2024). Pengaruh good corporate governance terhadap tax avoidance (studi empiris pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2023). *Diponegoro Journal of Accounting*, 13(4), 1–15. <http://eprints.mercubuana-yogya.ac.id/9918/>
- Dewi, S. (2025). The impact of audit committee and audit partner tenure on tax avoidance in banking. *Jurnal Akuntansi Dan Auditing Indonesia*.
- Faricha, T., & Ermawati, Y. (2025). Pengaruh kepemilikan institusional, dewan komisaris, dan komite audit terhadap tax avoidance. *Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Sosial*, 3(1), 126–137.
- Ibrahim, R., Rahayu, N. E., & Primasiwi, A. (2025). Pengaruh komisaris independen dan komite audit terhadap tax avoidance. *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Perpajakan*, 2(1), 122–130.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of The Firm: managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3(10), 306–360. <https://doi.org/10.1177/0018726718812602>
- Julvita, F. muliana, & Pusposari, D. (2025). Effect of profitability, political connections, and gender diversity on tax avoidance. *Telaah Ilmiah Akuntansi Dan Perpajakan*, 3(1), 80–94. <https://doi.org/10.21776/tiara.2025.3.1.177>
- Mala, N. N., & Ardiyanto, M. D. (2021). Pengaruh diversitas gender dewan direksi dan ukuran dewan direksi terhadap penghindaran pajak. *Diponegoro Journal of Accounting*, 10(1992), 1–11.
- Manuela, A., & Sandra, A. (2022). Pengaruh diversitas, gender dalam dewan direksi, dewan komisaris, dan komite audit, serta kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional terhadap agresivitas pajak. *Journal of Applied Managerial Accounting*, 6, 1–17.
- Martin, B., & Kunci, K. (2024). Pengaruh kesulitan keuangan, profitabilitas dan dewan komisaris independen terhadap penghindaran pajak. *Jurnal Ekonomi Dan Ekonomi Syariah*, 7(2), 1545–1557.
- Martini, M., & Rismawandi, R. (2025). Tax Avoidance of mining industry registered on Indonesia Stock Exchange period 2020-2023. *Sebatik*, 29(1), 173–180. <https://doi.org/10.46984/sebatik.v29i1.2577>
- Pramudya, A., & Rahayu, Y. (2021). Pengaruh profitabilitas, leverage, dewan komisaris independen dan komite audit terhadap tax avoidance. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*.
- Rizqia, A., & Lastiati, A. (2021). Audit quality and tax avoidance: the role of independent commissioners and audit committee's financial expertise. *Journal of Accounting Auditing*

- and Business*, 4(1), 14–31. <https://doi.org/10.24198/jaab.v4i1.29642>
- Satiti, A. D. R., Hasanah, M., & Amelia, R. W. (2026). Profitabilitas, leverage, intensitas modal dan penghindaran pajak pada perusahaan energi: pendekatan Teori Agensi Profitability, Leverage. *Monex – Journal of Accounting Research*, 15(01), 56-68. <https://doi.org/10.30591/monex.v15i1.9936.g3860>
- Satiti, A. D. R., Syafik, M., & Widarjo, W. (2021). Political connections and tax aggressiveness: the role of gender diversity as a moderating variable. *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi*, 21(2), 273–292. <https://doi.org/10.25105/mraai.v21i2.9794>
- Sri Utaminingsih, N., Kurniasih, D., Pramono Sari, M., & Rahardian Ary Helmina, M. (2022). The role of internal control in the relationship of board gender diversity, audit committee, and independent commissioner on tax aggressiveness. *Cogent Business & Management*, 9(1), 2122333. <https://doi.org/10.1080/23311975.2022.2122333>
- Sulistyawati, A., & Rahmawati, A. I. E. (2024). Determinants of tax avoidance: gender diversity, capital intensity, audit committee, and board size. *Ultimaccounting Jurnal Ilmu Akuntansi*, 16(1), 152–170. <https://doi.org/10.31937/akuntansi.v16i1.3571>
- Zudana, A. E., Abram, C. J., Hutabarat, R. G. L., & Haikal, A. (2021). *Perempuan dan Penghindaran Pajak: Bukti dari Perspektif Masalah Agen*. 11, 667–678. <https://doi.org/10.22219/jrak.v11i3.17871>